

**BERITA DAERAH  
KOTA DEPOK**



**TAHUN 2008 NOMOR 63**

---

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 63 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**PASAR TUGU, PASAR CISALAK, PASAR AGUNG DAN PASAR KEMIRI MUKA  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN PASAR**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Pembentukan, penghapusan, nomenklatur serta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan pasar perlu dibentuk UPT Pasar Tugu, Pasar Cisalak, Pasar Agung dan Pasar Kemiri Muka dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Pasar Tugu, Pasar Cisalak, Pasar Agung dan Pasar Kemiri Muka pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang .....  
.....

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011 Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR TUGU, PASAR CISALAK, PASAR AGUNG DAN PASAR KEMIRI MUKA PADA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok .
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok .
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pasar Tugu, Pasar Cisalak, Pasar Agung dan Pasar Kemiri Muka pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar.
7. Kepala .....

7. Kepala UPT, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Tugu, Pasar Cisalak, Pasar Agung dan Pasar Kemiri Muka pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPT.

## **BAB II**

### **P E M B E N T U K A N**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, sebanyak 4 (empat) UPT, yaitu :

- a. UPT Pasar Tugu, yang meliputi Pasar Tugu;
- b. UPT Pasar Cisalak, yang meliputi Pasar Cisalak dan Pasar Sukatani;
- c. UPT Pasar Agung, yang meliputi Pasar Agung, Pasar Musi dan Pasar UKM Ujung Jalan Proklamasi; dan
- d. UPT Pasar Kemiri Muka, yang meliputi Pasar Kemiri Muka dan Pasar Renijaya.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### Pasal 3

- (1) UPT Pasar adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pasar.
- (2) UPT Pasar dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar.

BAB .....

**BAB IV**  
**ORGANISASI**

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Walikota ini, Unsur Organisasi UPT terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPT;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum adalah Petugas Pengelola Pasar.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan pasar serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala UPT mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT dibidang pengelolaan pengelolaan pasar mengacu kepada rencana strategis Dinas;
  - b. pelaksanaan teknis pengelolaan pasar;
  - d. pelaksanaan kebijakan Teknis Daerah pengelolaan pasar;
  - e. pemeliharaan pasar;
  - f. pengelolaan dan pengoperasian pasar; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan UPT;
  - b. pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di seluruh satuan organisasi dilingkungan UPT;

e. pelaksanaan .....

- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPT dan seluruh satuan organisasi dilingkungan UPT;
- f. pelaksanaan penyiapan dan menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja UPT dibawah koordinasi Dinas;
- g. pelaksanaan investarisasi dan pemeliharaan kantor UPT dan investaris kantor;
- h. pelaksanaan penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan dan pengelolaan pasar;
- i. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPT;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- k. penyusunan serta penyampaian laporan UPT secara berkala; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 3

### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal .....

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### Bagian Pertama

##### U m u m

#### Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPT merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagai pelaksana urusan Pengelolaan Pasar, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh jabatan fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian .....

Bagian Kedua  
P e l a p o r a n  
Pasal 11

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili  
Pasal 12

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian dilingkup UPT.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPT ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB .....

---

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 30 Desember 2008

**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok

pada tanggal 30 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**



**Dra. WINWIN WINANTIKA, MM**

**NIP. 480 093 043**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR : 633**